



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Peran Tu'a Teno Desa Lungar dalam Proses Pengembangan PLTP Poco Leok di Kabupaten Manggarai

The Role of the Tu'a Teno of Lungar Village in the Development of the Poco Leok Geothermal Power Plant in Manggarai Regency

Yuliani Citra Jenida¹, Yohanes Jimmy Nami², Philips Y.N. Ndoda³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana-Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: Citrajenida@gmail.com¹

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 17 June, 2026

Revised: 11 July, 2026

Accepted: 20 August, 2026

Kata Kunci:

Kuasa Mikro, Legitimasi Adat, Michel Foucault, PLTP Poco Leok, Tu'a Teno

Keywords:

Micro-Power, Customary Legitimacy, Michel Foucault, Poco Leok Geothermal Power Plant, Tu'a Teno

DOI: [10.56338/jks.v9i8.11852](https://doi.org/10.56338/jks.v9i8.11852)

ABSTRAK

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok di Kabupaten Manggarai merupakan bagian dari kebijakan transisi energi nasional menuju pemanfaatan energi baru terbarukan. Implementasi proyek ini memunculkan dinamika sosial-politik di tingkat lokal, khususnya terkait peran lembaga adat dalam merespons pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Tu'a Teno Desa Lungar dalam proses pengembangan PLTP Poco Leok dengan memfokuskan perhatian pada Tu'a Teno dari gendang yang mendukung proyek sebagai representasi fenomena yang diteliti. Penelitian menggunakan teori Kuasa Mikro Michel Foucault untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa, pengetahuan, dan wacana membentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan dikembangkan melalui snowball sampling. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tu'a Teno memiliki peran strategis sebagai mediator sosial, pemberi legitimasi adat, serta penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan pihak pengembang. Melalui mekanisme adat seperti lonto leok dan tabe gendang, Tu'a Teno memfasilitasi musyawarah, membangun komunikasi, serta memperkuat legitimasi terhadap keputusan yang dihasilkan secara kolektif. Sosialisasi proyek menjadi proses produksi pengetahuan yang membentuk pemahaman masyarakat mengenai pembangunan, kebutuhan energi, dan kesejahteraan. Dalam perspektif teori Kuasa Mikro Michel Foucault, kuasa bekerja secara produktif dan tersebar melalui jaringan relasi sosial, produksi pengetahuan, serta wacana pembangunan. Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap pengembangan PLTP Poco Leok tidak hanya ditentukan oleh kewenangan negara, tetapi juga oleh legitimasi yang dibangun melalui struktur dan otoritas adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tu'a Teno tidak hanya berperan sebagai penjaga adat, tetapi juga sebagai aktor yang memediasi kepentingan dan membentuk penerimaan masyarakat terhadap pembangunan.

ABSTRACT

The development of the Poco Leok Geothermal Power Plant (PLTP) in Manggarai Regency is part of Indonesia's national energy transition policy toward the utilization of renewable energy. The implementation of this project has generated socio-political dynamics at the local level, particularly regarding the role of customary institutions in responding to development initiatives. This study aims to analyze the role of Tu'a Teno in Lungar Village in the development process of the Poco Leok Geothermal Power Plant, with a particular focus on Tu'a Teno from gendang (customary clans) that support the project as the representation of the phenomenon under study. The research employs Michel Foucault's Micro-Power Theory to examine how power relations, knowledge, and discourse shape community support for development. This study uses a qualitative case study approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and further developed through snowball sampling. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Tu'a Teno plays a strategic role as a social mediator, a source of customary legitimacy, and a bridge between the community, the government, and the project developer. Through customary mechanisms such as lonto leok and tabe gendang, Tu'a Teno facilitates deliberation, strengthens communication, and reinforces the legitimacy of collectively agreed decisions. Project socialization functions as a process of knowledge production that shapes community understanding of development, energy needs, and public welfare. From the perspective of Michel Foucault's Micro-Power Theory, power operates productively and is dispersed through networks of social relations, the production of knowledge, and development discourse. Consequently, community acceptance of the Poco Leok Geothermal Power Plant development is determined not only by state authority but also by the legitimacy constructed through customary structures and authorities. This study demonstrates that Tu'a Teno serves not only as the guardian of customary institutions but also as an actor who mediates interests and shapes community acceptance of development.

PENDAHULUAN

Transisi menuju energi bersih menjadi salah satu agenda strategis yang terus didorong oleh berbagai negara sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan energi, perubahan iklim, dan komitmen global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar menempatkan pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan energi nasional. Pemanfaatan panas bumi dipandang mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan karena memiliki karakteristik ramah lingkungan dan mampu menyediakan pasokan listrik secara berkesinambungan (Brisman & South, 2019). Kebijakan tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan yang memberikan dasar hukum bagi percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia (Brisman & South, 2019).

Salah satu implementasi kebijakan tersebut adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan PLTP Ulumbu yang telah beroperasi sejak tahun 2012 dan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyediaan energi listrik di wilayah Flores serta mendukung target bauran energi nasional. Keberadaan proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyediaan energi, tetapi juga bersinggungan secara langsung dengan ruang hidup masyarakat adat karena sebagian wilayah pengembangan berada pada kawasan tanah ulayat yang dikelola berdasarkan sistem adat Manggarai. Kondisi tersebut menjadikan pembangunan PLTP Poco Leok bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga ruang perjumpaan antara kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat adat yang memiliki sistem nilai, norma, dan kelembagaan tersendiri.

Dalam masyarakat Manggarai, tanah ulayat bukan hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi historis, spiritual, dan sosial yang sangat kuat. Tanah merupakan warisan leluhur yang menjadi simbol identitas kolektif masyarakat adat sehingga setiap bentuk pemanfaatannya harus melalui mekanisme adat yang telah diwariskan secara turun-temurun (Toda, 1999). Hubungan masyarakat dengan tanah juga berkaitan erat dengan keberadaan Mbaru Gendang sebagai pusat kehidupan adat dan simbol persatuan komunitas (Verheijen, 1991). Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan tanah ulayat tidak hanya memerlukan persetujuan administratif dari pemerintah, tetapi juga legitimasi sosial yang dibangun melalui struktur kelembagaan adat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan pengembang dalam membangun komunikasi dengan para pemegang otoritas adat.

Salah satu aktor yang memiliki posisi strategis dalam sistem adat Manggarai adalah Tu'a Teno. Dalam struktur kelembagaan adat, Tu'a Teno bertanggung jawab mengatur pembagian, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah ulayat melalui sistem *lingko*. Kedudukannya menjadikan Tu'a Teno memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan penggunaan ruang adat, termasuk ketika wilayah tersebut menjadi bagian dari proyek pembangunan. Otoritas tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperoleh pengakuan sosial karena dibangun melalui nilai-nilai adat, hubungan genealogis, dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, keputusan maupun sikap Tu'a Teno sering menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menentukan respons terhadap berbagai kebijakan pembangunan.

Dalam proses pengembangan PLTP Poco Leok, masyarakat Desa Lungar memperlihatkan dinamika sosial yang cukup kompleks. Sebagian masyarakat memberikan dukungan terhadap proyek karena memandang pembangunan tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan, membuka akses pembangunan, dan memperkuat penyediaan energi listrik. Sebaliknya, sebagian masyarakat lainnya menunjukkan sikap penolakan karena mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan, keberlanjutan tanah ulayat, serta kelestarian nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat. Perbedaan pandangan tersebut melahirkan polarisasi sosial yang turut memengaruhi hubungan antaranggota masyarakat maupun hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak pengembang proyek.

Di tengah kondisi tersebut, Tu'a Teno tidak berada pada posisi yang sepenuhnya netral. Sebagian Tu'a Teno memilih memberikan dukungan terhadap pengembangan PLTP Poco Leok dengan mempertimbangkan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui persetujuan terhadap penggunaan tanah, tetapi juga melalui berbagai aktivitas mediasi, sosialisasi, dan musyawarah adat yang bertujuan membangun pemahaman masyarakat mengenai proyek. Posisi ini menempatkan Tu'a Teno sebagai aktor yang menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai penjaga legitimasi adat dan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dengan agenda pembangunan yang dibawa oleh negara.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan pembentukan makna, negosiasi kepentingan, dan reproduksi legitimasi. Dalam konteks ini, penerimaan masyarakat terhadap pembangunan bukan hanya ditentukan oleh besarnya manfaat ekonomi yang dijanjikan, melainkan juga dipengaruhi oleh cara informasi disampaikan, siapa yang menyampaikan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aktor yang terlibat. Oleh karena itu, keberadaan Tu'a Teno menjadi penting karena otoritas adat yang dimilikinya mampu membangun jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun pengembang proyek.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembangunan panas bumi sering menghadapi tantangan berupa konflik sosial, lemahnya komunikasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sauni et al. (2022) menjelaskan bahwa konflik dalam pengembangan panas bumi umumnya muncul akibat kurang optimalnya sosialisasi serta belum efektifnya mekanisme penyelesaian konflik berbasis masyarakat. Dinan dan Hidayati (2021) juga menemukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai proyek sangat memengaruhi terbentuknya dukungan maupun penolakan terhadap pembangunan. Penelitian lain oleh Hasan et al. (2023) memperlihatkan bahwa tokoh adat memiliki peran strategis dalam menjaga legitimasi sosial dan keberlangsungan nilai budaya di tengah perubahan sosial. Sementara itu, Bupu et al. (2024) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan energi tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada kualitas hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Di sisi lain, Lating et al. (2025) menunjukkan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat melalui penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam setiap tahapan pengembangan proyek panas bumi.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas pembangunan panas bumi dari aspek hukum, lingkungan, partisipasi masyarakat, maupun konflik sosial, sebagian besar masih memosisikan masyarakat adat sebagai kelompok yang homogen. Kajian-kajian tersebut belum banyak memberikan perhatian terhadap dinamika internal lembaga adat, khususnya mengenai bagaimana pemegang otoritas adat yang mendukung pembangunan membangun legitimasi sosial di tengah munculnya perbedaan pandangan dalam komunitasnya sendiri. Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik untuk memahami bagaimana otoritas adat bekerja ketika berhadapan dengan agenda pembangunan modern yang membawa kepentingan negara sekaligus memengaruhi struktur sosial masyarakat adat.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Kuasa Mikro Michel Foucault. Foucault memandang bahwa kuasa tidak semata-mata berada pada institusi formal seperti negara, melainkan tersebar melalui berbagai relasi sosial, praktik keseharian,

dan produksi pengetahuan (Foucault, 1980). Dalam perspektif ini, kuasa tidak hanya bekerja secara represif, tetapi juga bersifat produktif karena membentuk cara berpikir, cara bertindak, dan cara masyarakat memahami suatu realitas. Pengetahuan, wacana, dan praktik sosial menjadi instrumen yang memungkinkan kuasa bekerja secara halus melalui proses normalisasi sehingga individu menerima suatu gagasan sebagai sesuatu yang wajar (Foucault, 1980). Pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana Tu'a Teno yang mendukung proyek ini menjalankan otoritas adat, membangun legitimasi, serta memediasi penerimaan masyarakat terhadap pengembangan PLTP Poco Leok.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini memandang bahwa dukungan masyarakat terhadap pengembangan PLTP Poco Leok tidak hanya lahir dari pertimbangan ekonomi maupun kebijakan pemerintah, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara struktur adat, produksi pengetahuan, dan wacana pembangunan yang berlangsung melalui relasi sosial di tingkat lokal. Tu'a Teno menjadi aktor penting yang tidak hanya menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat, tetapi juga berperan dalam membentuk cara masyarakat memaknai pembangunan melalui mekanisme musyawarah adat, komunikasi sosial, dan pemberian legitimasi terhadap keputusan kolektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya sikap mendukung maupun menolak pembangunan, melainkan untuk memahami bagaimana otoritas adat bekerja dalam membentuk penerimaan masyarakat terhadap proyek pembangunan energi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Tu'a Teno yang mendukung proyek dalam proses pengembangan PLTP Poco Leok di Kabupaten Manggarai melalui perspektif Teori Kuasa Mikro Michel Foucault. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai relasi antara otoritas adat, kekuasaan lokal, dan pembangunan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merancang pembangunan yang lebih menghormati nilai-nilai masyarakat adat serta memperkuat partisipasi sosial dalam setiap tahapan pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam peran Tu'a Teno (Kepala Ulayat) desa Lungar dalam proses pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok melalui pengalaman, tindakan, serta pemaknaan para aktor yang terlibat dalam dinamika pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara otoritas adat, masyarakat, pemerintah, dan pengembang proyek dalam konteks sosial yang berlangsung secara alamiah (Moleong, 2017). Adapun studi kasus merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu kasus yang spesifik dalam konteks kehidupan nyata, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti beserta berbagai faktor yang melingkupinya.

Penelitian dilaksanakan di Desa Lungar, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu wilayah pengembangan PLTP Poco Leok. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Desa Lungar memiliki struktur masyarakat adat yang masih kuat serta menjadi salah satu wilayah yang mengalami dinamika sosial akibat pengembangan proyek panas bumi. Keberadaan Tu'a Teno

sebagai pemegang otoritas adat menjadikan desa ini relevan untuk mengkaji bagaimana relasi kuasa, legitimasi adat, dan praktik pembangunan berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Subjek penelitian terdiri atas Tu'a Teno, tokoh adat, masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan, serta pemerintah desa yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan PLTP Poco Leok. Informan dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2022). Untuk memperluas informasi yang diperoleh, penelitian juga menerapkan snowball sampling, sehingga informan awal dapat merekomendasikan informan lain yang memiliki informasi relevan mengenai proses pembangunan dan peran Tu'a Teno. Teknik ini dipilih agar peneliti mampu memperoleh data yang lebih kaya mengenai hubungan antara struktur adat, masyarakat, dan pemerintah dalam pengembangan proyek.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki keleluasaan menggali pengalaman, pandangan, dan pemaknaan informan terhadap proses pengembangan PLTP Poco Leok. Observasi dilakukan secara langsung untuk memahami kondisi sosial masyarakat, pelaksanaan aktivitas adat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan melalui berbagai dokumen, seperti regulasi pemerintah, arsip desa, berita acara, dokumen pengembangan proyek, foto kegiatan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pembangunan energi panas bumi dan masyarakat adat. Kombinasi ketiga teknik tersebut memungkinkan peneliti melakukan triangulasi data sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi.

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam suara, kamera dokumentasi, serta catatan lapangan yang digunakan untuk merekam berbagai informasi selama proses penelitian berlangsung. Penggunaan beberapa instrumen tersebut bertujuan menjaga kelengkapan data serta memudahkan peneliti dalam melakukan proses analisis secara sistematis.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu ditranskripsikan, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul selama penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perspektif teori kuasa mikro Michel Foucault dengan memfokuskan pembahasan pada lima indikator, yaitu (1) kuasa yang produktif dan tersebar, (2) relasi kuasa dan pengetahuan (*power/knowledge*), (3) pembentukan wacana pembangunan, (4) kuasa yang bekerja melalui relasi sosial, dan (5) internalisasi wacana pembangunan dalam masyarakat. Melalui kerangka tersebut, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana Tu'a Teno menjalankan otoritas adat dalam membentuk penerimaan masyarakat terhadap pengembangan PLTP Poco Leok.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian sehingga interpretasi mengenai peran Tu'a Teno dalam proses pengembangan PLTP Poco Leok didasarkan pada data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Legitimasi Pembangunan melalui Kuasa yang Produktif dan Tersebar

Salah satu temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok di Desa Lungar tidak dibangun melalui mekanisme administratif ataupun kewenangan formal pemerintah semata, melainkan diproduksi melalui praktik-praktik sosial yang hidup dalam kelembagaan adat. Dalam konteks masyarakat Manggarai, legitimasi pembangunan tidak dipahami sebagai hasil keputusan individual seorang pemimpin adat, tetapi sebagai produk dari proses kolektif yang berlangsung melalui musyawarah adat (*lonto leok*), pengambilan keputusan bersama, serta penguatan simbolik melalui ritual *tabe gendang*. Oleh karena itu, penerimaan masyarakat terhadap pembangunan tidak dapat dipisahkan dari cara kerja lembaga adat dalam membangun kesepakatan sosial yang memperoleh pengakuan bersama.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Tu'a Teno menjalankan fungsi yang lebih luas daripada sekadar Pemangku adat. Dalam proses pengembangan PLTP Poco Leok, Tu'a Teno bertindak sebagai fasilitator musyawarah, mediator kepentingan, sekaligus pemberi legitimasi terhadap keputusan yang telah disepakati masyarakat. Keputusan mengenai dukungan terhadap proyek tidak dihasilkan melalui instruksi sepihak dari Tu'a Teno, tetapi melalui forum *lonto leok* yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, mempertimbangkan manfaat dan risiko pembangunan, serta mencapai mufakat berdasarkan prinsip kolektivitas yang menjadi karakter masyarakat adat Manggarai. Setelah kesepakatan tercapai, keputusan tersebut kemudian diperkuat melalui ritual *tabe gendang* sebagai bentuk pengesahan adat sehingga memperoleh legitimasi sosial sekaligus legitimasi simbolik. Temuan ini menunjukkan bahwa otoritas Tu'a Teno memperoleh kekuatan bukan karena posisi personalnya, tetapi karena kemampuannya mengartikulasikan keputusan kolektif masyarakat dalam kerangka norma adat.

Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi pembangunan lahir melalui proses produksi kuasa yang tersebar di antara berbagai aktor dalam masyarakat. Tu'a Teno, Tu'a Gendang, tokoh adat, pemerintah desa, serta masyarakat adat saling berinteraksi dalam membangun keputusan yang dianggap sah. Dengan demikian, kuasa tidak bekerja dalam bentuk dominasi yang memaksakan kehendak salah satu pihak, tetapi melalui jaringan relasi sosial yang memungkinkan terbentuknya konsensus. Dalam konteks ini, *lonto leok* berfungsi sebagai arena deliberasi politik lokal, sedangkan *tabe gendang* menjadi mekanisme yang mentransformasikan kesepakatan sosial menjadi legitimasi adat yang mengikat seluruh anggota komunitas.

Temuan tersebut memperlihatkan relevansi konsep kuasa produktif yang dikemukakan Michel Foucault. Menurut Foucault (1980), kuasa tidak hanya bekerja melalui larangan atau pemaksaan, tetapi juga melalui kemampuan menghasilkan praktik, pengetahuan, norma, dan kebenaran yang diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, kuasa tidak tampak sebagai instrumen represif yang dijalankan oleh Tu'a Teno terhadap masyarakat, melainkan sebagai proses yang menghasilkan legitimasi pembangunan melalui praktik musyawarah adat. Kuasa bekerja secara produktif karena menciptakan ruang partisipasi, membentuk kesepakatan, dan menghasilkan penerimaan terhadap proyek PLTP Poco Leok.

Selain bersifat produktif, kuasa dalam penelitian ini juga menunjukkan karakter yang tersebar (*dispersed power*). Otoritas pembangunan tidak sepenuhnya berada di tangan

pemerintah ataupun PT PLN (Persero), demikian pula otoritas adat tidak dimonopoli oleh Tu'a Teno. Pemerintah memerlukan legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat agar pembangunan dapat diterima masyarakat, sementara Tu'a Teno membutuhkan persetujuan masyarakat agar keputusan adat memperoleh kekuatan normatif. Relasi tersebut menunjukkan bahwa kuasa diproduksi melalui jaringan hubungan antarlembaga dan antaraktor, bukan dimiliki secara mutlak oleh satu institusi.

Hasil penelitian ini memperluas temuan Sauni et al. (2022) yang menjelaskan bahwa konflik dalam pengembangan PLTP Poco Leok dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, persoalan komunikasi, dan sengketa lahan. Penelitian tersebut berfokus pada dinamika konflik, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa pada kelompok masyarakat yang mendukung proyek terdapat mekanisme kelembagaan adat yang secara aktif memproduksi legitimasi pembangunan melalui musyawarah, mediasi, dan ritual adat. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa pembangunan di wilayah masyarakat adat tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan negara menjalankan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan otoritas adat ke dalam proses pembentukan legitimasi politik.

Produksi Pengetahuan Pembangunan melalui Relasi *Power/Knowledge*

Salah satu temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok di Desa Lungar tidak dibangun melalui mekanisme administratif ataupun kewenangan formal pemerintah semata, melainkan diproduksi melalui praktik-praktik sosial yang hidup dalam kelembagaan adat. Dalam konteks masyarakat Manggarai, legitimasi pembangunan tidak dipahami sebagai hasil keputusan individual seorang pemimpin adat, tetapi sebagai produk dari proses kolektif yang berlangsung melalui musyawarah adat (*lonto leok*), pengambilan keputusan bersama, serta penguatan simbolik melalui ritual *tabe gendang*. Oleh karena itu, penerimaan masyarakat terhadap pembangunan tidak dapat dipisahkan dari cara kerja lembaga adat dalam membangun kesepakatan sosial yang memperoleh pengakuan bersama.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Tu'a Teno menjalankan fungsi yang lebih luas daripada sekadar pemimpin adat. Dalam proses pengembangan PLTP Poco Leok, Tu'a Teno bertindak sebagai fasilitator musyawarah, mediator kepentingan, sekaligus pemberi legitimasi terhadap keputusan yang telah disepakati masyarakat. Keputusan mengenai dukungan terhadap proyek tidak dihasilkan melalui instruksi sepihak dari Tu'a Teno, tetapi melalui forum *lonto leok* yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, mempertimbangkan manfaat dan risiko pembangunan, serta mencapai mufakat berdasarkan prinsip kolektivitas yang menjadi karakter masyarakat adat Manggarai. Setelah kesepakatan tercapai, keputusan tersebut kemudian diperkuat melalui ritual *tabe gendang* sebagai bentuk pengesahan adat sehingga memperoleh legitimasi sosial sekaligus legitimasi simbolik. Temuan ini menunjukkan bahwa otoritas Tu'a Teno memperoleh kekuatan bukan karena posisi personalnya, tetapi karena kemampuannya mengartikulasikan keputusan kolektif masyarakat dalam kerangka norma adat.

Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi pembangunan lahir melalui proses produksi kuasa yang tersebar di antara berbagai aktor dalam masyarakat. Tu'a Teno, Tu'a Gendang, tokoh adat, pemerintah desa, serta masyarakat adat saling berinteraksi dalam membangun keputusan yang dianggap sah. Dengan demikian, kuasa tidak bekerja dalam bentuk dominasi yang memaksakan kehendak salah satu pihak, tetapi melalui jaringan relasi

sosial yang memungkinkan terbentuknya konsensus. Dalam konteks ini, *lonto leok* berfungsi sebagai arena deliberasi politik lokal, sedangkan *tabe gendang* menjadi mekanisme yang mentransformasikan kesepakatan sosial menjadi legitimasi adat yang mengikat seluruh anggota komunitas.

Temuan tersebut memperlihatkan relevansi konsep kuasa produktif yang dikemukakan Michel Foucault. Menurut Foucault (1980), kuasa tidak hanya bekerja melalui larangan atau pemaksaan, tetapi juga melalui kemampuan menghasilkan praktik, pengetahuan, norma, dan kebenaran yang diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, kuasa tidak tampak sebagai instrumen represif yang dijalankan oleh Tu'a Teno terhadap masyarakat, melainkan sebagai proses yang menghasilkan legitimasi pembangunan melalui praktik musyawarah adat. Kuasa bekerja secara produktif karena menciptakan ruang partisipasi, membentuk kesepakatan, dan menghasilkan penerimaan terhadap proyek PLTP Poco Leok.

Selain bersifat produktif, kuasa dalam penelitian ini juga menunjukkan karakter yang tersebar (*dispersed power*). Otoritas pembangunan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah ataupun PT PLN (Persero), demikian pula otoritas adat tidak dimonopoli oleh Tu'a Teno. Pemerintah memerlukan legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat agar pembangunan dapat diterima masyarakat, sementara Tu'a Teno membutuhkan persetujuan masyarakat agar keputusan adat memperoleh kekuatan normatif. Relasi tersebut menunjukkan bahwa kuasa diproduksi melalui jaringan hubungan antarlembaga dan antaraktor, bukan dimiliki secara mutlak oleh satu institusi.

Hasil penelitian ini memperluas temuan Sauni et al. (2022) yang menjelaskan bahwa konflik dalam pengembangan PLTP Poco Leok dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, persoalan komunikasi, dan sengketa lahan. Penelitian tersebut berfokus pada dinamika konflik, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa pada kelompok masyarakat yang mendukung proyek terdapat mekanisme kelembagaan adat yang secara aktif memproduksi legitimasi pembangunan melalui musyawarah, mediasi, dan ritual adat. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa pembangunan di wilayah masyarakat adat tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan negara menjalankan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan otoritas adat ke dalam proses pembentukan legitimasi politik.

Pembentukan Realitas Sosial melalui Wacana Pembangunan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok di Desa Lungar tidak hanya menghadirkan perubahan pada aspek fisik pembangunan, tetapi juga membentuk cara masyarakat memaknai realitas sosial melalui produksi wacana pembangunan. Wacana tersebut berkembang melalui berbagai proses komunikasi yang melibatkan pemerintah, PT PLN (Persero), Tu'a Teno, dan masyarakat adat. Dalam proses tersebut, pembangunan dikonstruksikan sebagai simbol kemajuan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Desa Lungar. Akibatnya, dukungan terhadap proyek tidak semata-mata muncul karena pertimbangan ekonomi, tetapi juga karena masyarakat mulai memandang pembangunan sebagai kebutuhan yang selaras dengan kepentingan bersama.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa narasi mengenai manfaat PLTP secara konsisten disampaikan dalam berbagai forum sosialisasi dan musyawarah adat. Pemerintah dan pihak pengembang memperkenalkan pembangunan sebagai bagian dari kebijakan transisi energi nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan energi sekaligus memperluas pembangunan daerah. Narasi tersebut kemudian diterjemahkan kembali oleh Tu'a Teno melalui

bahasa dan simbol-simbol budaya yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam forum *lonto leok*, misalnya, pembangunan dipahami sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda, memperbaiki infrastruktur desa, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat adat. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi dipersepsikan hanya sebagai proyek pemerintah, tetapi sebagai bagian dari harapan kolektif masyarakat terhadap masa depan desa.

Peran Tu'a Teno dalam proses tersebut tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai produsen makna yang menghubungkan nilai-nilai pembangunan dengan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penjelasan mengenai PLTP tidak disampaikan menggunakan pendekatan teknis semata, melainkan dikaitkan dengan prinsip kebersamaan, tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan kepentingan kolektif masyarakat gendang. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan memperoleh makna baru yang lebih mudah diterima karena tidak diposisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan adat, melainkan sebagai upaya yang dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap PLTP merupakan hasil dari proses pembentukan realitas sosial melalui reproduksi wacana pembangunan. Masyarakat yang sebelumnya memiliki beragam pandangan terhadap proyek secara bertahap mulai membangun pemahaman bersama mengenai manfaat pembangunan. Realitas sosial mengenai PLTP tidak terbentuk secara alamiah, tetapi dikonstruksi melalui interaksi yang terus-menerus antara negara, lembaga adat, dan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan menjadi kenyataan sosial karena diproduksi dan dipertahankan melalui praktik komunikasi yang berlangsung dalam ruang-ruang sosial masyarakat adat.

Temuan ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemikiran Michel Foucault mengenai wacana (*discourse*). Menurut Foucault (1972; 1980), wacana bukan sekadar rangkaian bahasa atau komunikasi, tetapi merupakan sistem pengetahuan yang membentuk cara individu memahami realitas, menentukan apa yang dianggap benar, dan mengarahkan praktik-praktik sosial. Dalam perspektif tersebut, pembangunan bukan hanya dipahami sebagai kegiatan pembangunan infrastruktur, melainkan sebagai wacana yang memproduksi cara pandang tertentu mengenai kemajuan, kesejahteraan, dan masa depan. Wacana pembangunan bekerja melalui bahasa, simbol, dan praktik sosial sehingga membentuk kerangka berpikir masyarakat mengenai apa yang dianggap sebagai pilihan yang rasional.

Dalam konteks penelitian ini, wacana pembangunan tidak bekerja melalui instruksi atau pemaksaan negara, tetapi melalui proses reproduksi makna yang melibatkan Tu'a Teno sebagai aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial. Narasi mengenai kesejahteraan, kemajuan desa, peningkatan kualitas hidup, dan manfaat bagi generasi mendatang terus direproduksi dalam forum adat sehingga secara bertahap membentuk cara masyarakat memandang PLTP Poco Leok. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa bekerja secara produktif melalui pembentukan wacana yang menghasilkan realitas sosial baru. Masyarakat menerima pembangunan bukan semata-mata karena adanya kebijakan pemerintah, tetapi karena pembangunan telah dipahami sebagai bagian dari kepentingan kolektif yang memperoleh legitimasi dalam struktur sosial masyarakat adat.

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Dinan dan Hidayati (2021) yang lebih menitikberatkan pada persepsi masyarakat terhadap pengembangan panas bumi berdasarkan

manfaat ekonomi dan risiko lingkungan. Penelitian tersebut menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat, tetapi belum menguraikan bagaimana persepsi tersebut dibentuk melalui proses produksi wacana. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh informasi mengenai manfaat proyek, tetapi juga oleh proses pembentukan makna yang berlangsung melalui interaksi antara negara, lembaga adat, dan masyarakat.

Relasi Adat dan Negara dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok di Desa Lungar tidak berlangsung melalui relasi yang bersifat hierarkis antara negara dan masyarakat adat, melainkan melalui jaringan interaksi yang melibatkan pemerintah, PT PLN (Persero), Tu'a Teno, serta masyarakat sebagai aktor-aktor yang saling memengaruhi dalam proses pembangunan. Implementasi kebijakan pembangunan tidak sepenuhnya ditentukan oleh kewenangan formal negara, tetapi juga bergantung pada kemampuan membangun hubungan dengan lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial di tingkat lokal. Dalam konteks tersebut, Tu'a Teno menempati posisi strategis sebagai aktor politik lokal yang menjembatani kepentingan negara dengan nilai, norma, dan aspirasi masyarakat adat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah dan PT PLN (Persero) memiliki otoritas formal untuk melaksanakan kebijakan pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak secara otomatis menghasilkan penerimaan masyarakat terhadap proyek. Sebelum berbagai tahapan pembangunan dilaksanakan, pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan para pemangku kepentingan adat, terutama Tu'a Teno, untuk membangun komunikasi dan memperoleh dukungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan di wilayah masyarakat adat tidak hanya bergantung pada instrumen hukum dan administratif, tetapi juga pada pengakuan terhadap struktur sosial yang hidup dalam komunitas lokal.

Dalam proses tersebut, Tu'a Teno menjalankan fungsi sebagai mediator yang menghubungkan dua sistem otoritas yang berbeda, yaitu otoritas negara yang berbasis regulasi formal dan otoritas adat yang berbasis legitimasi sosial. Melalui forum *lonto leok* dan mekanisme musyawarah adat, Tu'a Teno menyampaikan informasi mengenai rencana pembangunan, menampung berbagai pandangan masyarakat, serta memfasilitasi proses deliberasi hingga tercapai kesepakatan bersama. Sebaliknya, aspirasi, kekhawatiran, maupun harapan masyarakat juga dikomunikasikan kembali kepada pemerintah melalui peran Tu'a Teno. Dengan demikian, hubungan antara negara dan masyarakat tidak berlangsung secara langsung, tetapi dimediasi oleh lembaga adat yang memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Lungar.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam proses pembangunan bersifat dinamis dan negosiatif. Pemerintah membutuhkan legitimasi yang dimiliki oleh Tu'a Teno agar kebijakan pembangunan dapat diterima oleh masyarakat, sementara Tu'a Teno memerlukan informasi dan kepastian dari pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai tujuan serta manfaat pengembangan PLTP Poco Leok. Hubungan yang saling bergantung ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu aktor yang sepenuhnya mengendalikan proses pembangunan. Sebaliknya, implementasi kebijakan berlangsung melalui proses komunikasi, penyesuaian kepentingan, dan negosiasi yang terus berlangsung di antara para aktor.

Dalam perspektif Michel Foucault, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kuasa tidak bersifat terpusat ataupun dimiliki secara eksklusif oleh negara, melainkan tersebar dalam jaringan relasi sosial yang memungkinkan berbagai aktor saling memengaruhi (Foucault, 1980). Kuasa tidak hanya bekerja melalui kewenangan formal pemerintah, tetapi juga melalui praktik-praktik sosial yang menghasilkan legitimasi, pengetahuan, dan penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, negara tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya pusat kuasa dalam implementasi kebijakan pembangunan. Sebaliknya, lembaga adat melalui Tu'a Teno juga memiliki kapasitas untuk membentuk arah proses pembangunan melalui pengaruh sosial yang dimilikinya.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa relasi antara negara dan lembaga adat lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer daripada antagonistik. Negara membawa kebijakan, sumber daya, dan kewenangan administratif, sedangkan Tu'a Teno menghadirkan legitimasi sosial, kepercayaan masyarakat, serta kemampuan menerjemahkan kebijakan ke dalam konteks budaya lokal. Interaksi kedua bentuk otoritas tersebut memungkinkan pembangunan memperoleh dasar legitimasi yang lebih kuat dibandingkan apabila negara hanya mengandalkan pendekatan birokratis. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan yang kolaboratif dengan institusi lokal.

Temuan ini memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian Sauni et al. (2022) yang lebih banyak menyoroti konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan PLTP Poco Leok. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perbedaan persepsi, persoalan komunikasi, dan sengketa lahan menjadi faktor utama yang memunculkan konflik. Penelitian ini tidak menafikan adanya dinamika tersebut, tetapi menunjukkan bahwa pada kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan terdapat mekanisme negosiasi yang memungkinkan negara dan lembaga adat membangun hubungan kerja sama. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai implementasi kebijakan pembangunan dengan memperlihatkan bahwa relasi negara–masyarakat adat tidak selalu berbentuk pertentangan, tetapi juga dapat berkembang menjadi hubungan yang saling memperkuat melalui peran Tu'a Teno.

Temuan ini juga memperkaya kajian politik lokal yang selama ini cenderung memandang lembaga adat hanya sebagai aktor yang mempertahankan kepentingan tradisional atau melakukan resistensi terhadap kebijakan negara. Dalam penelitian ini, Tu'a Teno justru tampil sebagai aktor politik lokal yang mampu menjalankan fungsi mediasi, negosiasi, dan artikulasi kepentingan. Peran tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat tidak berada di luar sistem pemerintahan, tetapi menjadi bagian dari jaringan tata kelola lokal (*local governance*) yang memengaruhi proses implementasi kebijakan publik.

Pembentukan Penerimaan Pembangunan melalui Internalisasi Wacana dalam Masyarakat Adat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok di Desa Lungar tidak muncul secara spontan sebagai respons atas kebijakan pemerintah, melainkan merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi antara negara, lembaga adat, dan masyarakat. Penerimaan tersebut dibentuk melalui serangkaian praktik sosial yang diawali dengan sosialisasi pembangunan, dilanjutkan dengan musyawarah adat

(*lonto leok*), penguatan legitimasi melalui keputusan kolektif, serta reproduksi narasi pembangunan oleh Tu'a Teno dalam berbagai ruang sosial masyarakat. Proses tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat bukan sekadar bentuk persetujuan terhadap suatu proyek pembangunan, tetapi merupakan hasil dari terbentuknya cara pandang kolektif yang memaknai pembangunan sebagai bagian dari kepentingan bersama.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat pendukung PLTP mulai memandang pembangunan sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki infrastruktur desa, dan membuka prospek kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pandangan tersebut tidak hanya muncul dalam forum musyawarah adat, tetapi juga berkembang dalam percakapan sehari-hari di lingkungan keluarga, hubungan kekerabatan, maupun interaksi antaranggota masyarakat. Narasi mengenai manfaat pembangunan terus direproduksi melalui komunikasi informal sehingga secara perlahan menjadi bagian dari cara masyarakat memahami masa depan Desa Lungar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi dipersepsikan sebagai agenda pemerintah semata, tetapi telah diterima sebagai kepentingan kolektif masyarakat adat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan cara pandang masyarakat tidak terjadi karena adanya tekanan atau kewajiban untuk mendukung proyek PLTP. Sebaliknya, masyarakat menerima pembangunan setelah melalui proses dialog yang memungkinkan mereka memahami tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari pengembangan panas bumi. Dalam proses tersebut, Tu'a Teno memainkan peran penting sebagai aktor yang menghubungkan informasi dari pemerintah dengan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Melalui otoritas sosial yang dimilikinya, Tu'a Teno menjelaskan pembangunan dalam kerangka kepentingan bersama, tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan upaya meningkatkan kesejahteraan komunitas. Dengan demikian, penerimaan masyarakat lahir melalui proses pemaknaan yang berlangsung dalam ruang-ruang sosial masyarakat adat, bukan melalui instruksi sepihak dari negara.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa internalisasi wacana pembangunan berlangsung ketika masyarakat mulai menerima, mempercayai, dan mereproduksi narasi pembangunan sebagai bagian dari cara mereka memahami realitas sosial. Wacana mengenai kesejahteraan, kemajuan desa, dan pembangunan berkelanjutan tidak lagi dipandang sebagai narasi eksternal yang dibawa oleh pemerintah, tetapi telah menjadi kerangka berpikir yang digunakan masyarakat dalam menilai pentingnya proyek PLTP Poco Leok. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi aktor yang ikut menyebarkan dan memperkuat wacana tersebut dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi telah mengubah posisi masyarakat dari objek kebijakan menjadi subjek yang secara aktif mereproduksi makna pembangunan.

Dalam perspektif Michel Foucault, temuan ini menunjukkan bahwa kuasa mencapai efektivitasnya ketika individu menginternalisasi pengetahuan dan wacana yang diproduksi melalui berbagai praktik sosial (Foucault, 1977; 1980). Kuasa tidak selalu bekerja melalui mekanisme koersif atau dominasi yang tampak, tetapi melalui pembentukan cara berpikir yang membuat individu menerima suatu nilai atau pengetahuan sebagai sesuatu yang benar dan rasional. Pada konteks penelitian ini, penerimaan masyarakat terhadap PLTP Poco Leok tidak dibangun melalui paksaan negara, melainkan melalui proses produksi pengetahuan, pembentukan wacana, dan legitimasi sosial yang sebelumnya telah berlangsung dalam forum-

forum adat. Dengan kata lain, internalisasi wacana merupakan tahapan ketika kuasa yang telah diproduksi melalui relasi sosial diterima sebagai kesadaran kolektif masyarakat.

Temuan penelitian ini sekaligus memperlihatkan keterkaitan yang erat antara kelima dimensi kuasa yang dianalisis dalam penelitian. Kuasa yang produktif memungkinkan terbentuknya legitimasi pembangunan melalui mekanisme adat. Relasi *power/knowledge* menghasilkan pengetahuan baru mengenai manfaat pembangunan. Pengetahuan tersebut kemudian direproduksi menjadi wacana yang membentuk cara masyarakat memandang pembangunan. Selanjutnya, relasi kuasa antara negara dan lembaga adat menciptakan ruang negosiasi yang memungkinkan kebijakan pembangunan memperoleh legitimasi sosial. Keseluruhan proses tersebut pada akhirnya bermuara pada internalisasi wacana, yaitu ketika masyarakat menerima pembangunan sebagai bagian dari orientasi kolektif yang diyakini dan dipertahankan bersama. Dengan demikian, internalisasi wacana bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan hasil akhir dari keseluruhan mekanisme kuasa yang bekerja dalam pengembangan PLTP Poco Leok.

Hasil penelitian ini memperluas temuan Dinan dan Hidayati (2021) yang menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pengembangan panas bumi dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mengenai manfaat dan dampak proyek. Penelitian tersebut lebih menekankan hubungan antara informasi dan persepsi masyarakat, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat merupakan proses politik yang dibentuk melalui relasi kuasa dan kelembagaan adat. Pengetahuan mengenai pembangunan tidak hanya diterima oleh individu, tetapi mengalami proses reinterpretasi, legitimasi, dan reproduksi melalui otoritas sosial yang dimiliki Tu'a Teno sehingga berkembang menjadi kesadaran kolektif masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tu'a Teno yang mendukung proyek dalam proses pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok di Kabupaten Manggarai melalui perspektif Teori Kuasa Mikro Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tu'a Teno tidak hanya berperan sebagai pemegang otoritas adat, tetapi juga sebagai mediator sosial, pemberi legitimasi adat, penerjemah pengetahuan pembangunan, dan penghubung antara masyarakat adat, pemerintah, serta pihak pengembang. Peran tersebut dijalankan melalui mekanisme lonto leok, tabe gendang, serta proses sosialisasi yang membangun legitimasi terhadap keputusan pembangunan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pengembangan PLTP Poco Leok merupakan hasil dari proses negosiasi antara kelembagaan adat dan negara yang berlangsung melalui komunikasi, musyawarah, dan produksi pengetahuan. Dalam perspektif Teori Kuasa Mikro Michel Foucault, kuasa bekerja secara produktif dan tersebar melalui relasi sosial, pembentukan pengetahuan, dan internalisasi wacana pembangunan, sehingga penerimaan masyarakat tidak lahir dari dominasi negara, tetapi dari legitimasi yang dibangun melalui struktur adat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan di wilayah masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif dan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan kelembagaan adat sebagai sumber legitimasi sosial dalam proses pembangunan. Temuan ini menegaskan bahwa Tu'a Teno (Kepala Ulayat) merupakan

aktor strategis yang menjembatani kepentingan pembangunan dengan nilai-nilai adat, sehingga tercipta pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Allerton, C. (2004). *The real power of ritual in West Flores. Indonesia and the Malay World*.
- Brisman, A., & South, N. (2019). *Green criminology and environmental harms*.
- Bupu, M., dkk. (2024). *Dimensi politik lingkungan dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) Daratei Desa Ulubelu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*.
- Dinan, U. H., & Hidayati, N. (2021). *Persepsi masyarakat terhadap eksploitasi panas bumi di wilayah kerja pertambangan Kaldera Rawa Danau. Jurnal Kommunitas Online*.
- Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge*. Tavistock Publications.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Vintage Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Hasan, N., dkk. (2023). *Peranan tokoh adat dalam pelestarian dan pemanfaatan potensi budaya pada masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis. J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*.
- Lating, M. Q., dkk. (2025). *Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pemberian penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) panas bumi. PATTIMURA Law Study Review*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Sauni, H., dkk. (2022). *Energi geothermal dalam aturan, masalah lingkungan hidup dan solusi penyelesaian konflik di masyarakat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Toda, D. N. (1999). *Manggarai mencari pencerahan historiografi*. Nusa Indah.
- Verheijen, J. A. J. (1991). *The Manggaraians: A guide to traditional life*. KITLV Press